



Internalisasi Nilai Kearifan Lokal untuk Mendukung Kebijakan Penurunan Stunting di Desa Tinukari Kabupaten Kolaka Utara

Internalization Of Local Wisdom Values To Support The Policy Of Reducing Stunting In Tinukari Village, North Kolaka Regency

Dewi Umbarsari

Program Studi Kebidanan, Politeknik Sandi Karsa Makassar

Email: umbarsari_d@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memahami dan menganalisis peran nilai kearifan lokal dalam mendukung kebijakan penurunan stunting di pedesaan. Lokus penelitian dilakukan di Desa Tinukari Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara. Urgensi dari penelitian ini berangkat dari fenomena kasus stunting yang masih menjadi masalah secara nasional, sehingga memerlukan penanganan yang serius dari semua level pemerintahan, dari tingkat nasional hingga di tingkat pemerintahan desa. Keseriusan pemerintah desa dalam penanganan stunting harus terus didorong dalam rangka menyongsong bonus demografi tahun 2030 dan visi Indonesia emas tahun 2045. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan prosedur tiga alur proses, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa strategi kebijakan penanganan stunting yang dilakukan oleh pemerintah desa tinukari didasarkan hasil masukan dari berbagai elemen masyarakat pada acara kegiatan rembuk stunting di desa. Kegiatan rembuk stunting merupakan salah satu rangkaian pra musyawarah di tingkat desa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tinukari setiap tahunnya. Adapun strategi yang dilakukan antara lain adalah: (1) menggalakkan gerakan kembali ke alam (*back to nature*). Gerakan ini dilakukan dengan memaksimalkan potensi hasil pertanian yang dimiliki oleh desa tinukari. Dengan mendorong warga masyarakat terutama kaum ibu hamil dan menyusui untuk mengkonsumsi sayur-sayuran segar dari hasil kebun sendiri; (2) membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbasis kearifan lokal. Upaya konkrit yang dilakukan melalui gerakan ini adalah membangkitkan kembali spirit “mepokoaso” (bersatu/bergotong royong) dalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupan kemasyarakatan sesuai dengan peran masing-masing dalam masyarakat.

Kata Kunci: Kearifan lokal; Mepokoaso; Strategi; Kebijakan; Stunting.

Abstract

This study aims to understand and analyze the role of local wisdom values in supporting stunting reduction policies in rural areas. The research location was in Tinukari Village, Wawo District, North Kolaka Regency. The urgency of this study stems from the phenomenon of stunting cases which are still a national problem, so that it requires serious handling from all levels of government, from the national level to the village government level. The seriousness of the village government in handling stunting must continue to be encouraged in order to welcome the

demographic bonus in 2030 and the vision of a golden Indonesia in 2045. In this study, data collection was carried out through interviews and documentation studies. While data analysis was carried out with a three-flow process procedure, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the analysis show that the stunting handling policy carried out by the Tinukari village government is based on input from various elements of society at the stunting discussion event in the village. The stunting discussion activity is one of a series of pre-deliberations at the village level in order to prepare the Tinukari Village Government Work Plan (RKP) every year. The strategies carried out include: (1) encouraging the back to nature movement. This movement is carried out by maximizing the potential of agricultural products owned by Tinukari village. By encouraging residents, especially pregnant and breastfeeding mothers, to consume fresh vegetables from their own gardens; (2) building collaboration and synergy based on local wisdom. The concrete efforts made through this movement are to revive the spirit of "mepokoaso" (united/mutual cooperation) in solving every problem of community life according to their respective roles in society.

Keywords: *Local wisdom; Mepokoaso; Strategy; Policy; Stunting*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang berpendapatan menengah lainnya. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan penanganan yang serius karena dampaknya sangat signifikan terhadap perkembangan individu, dan juga berdampak pada siklus kemiskinan antargenerasi. Selain itu, akibat paling nyata adalah terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja. Tingginya prevalensi stunting juga menjadi salah satu indikator rendahnya kualitas sumber daya manusia suatu negara. Hal ini tentu berakibat pada terhambatnya pencapaian tujuan pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Kegagalan penyelesaian stunting juga dapat berakibat pada potensi tidak tercapainya target Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi yang diproyeksikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan dicapai tahun 2030, serta perwujudan Indonesia unggul tahun 2045 (Priyono, 2020).

Keseriusan pemerintah mengatasi masalah stunting, khususnya yang terjadi di pedesaan dimaksudkan untuk mendukung tujuan pembangunan desa melalui peningkatan kualitas hidup manusia perdesaan. Upaya pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan melalui berbagai program yang bersifat lintas sektor, maupun dengan melibatkan elemen masyarakat. Karena bagaimanapun permasalahan stunting dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak disandarkan kepada pemerintah semata. Peran pemerintah hanya sebagai mobilisator sumber daya, memberikan fasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan pengawasan, sehingga program kegiatan terkait penurunan stunting dapat diarahkan dan mencapai target yang ditetapkan (Priyono, 2020).

Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa adalah kebijakan tentang penurunan stunting. Dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan hak asal

usul dan kewenangan lokal, maka desa dapat menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan yang berskala desa melalui sinergitas dengan sektor penyedia layanan.

Keterlibatan pemerintah desa dalam upaya memberikan jaminan kualitas kesehatan masyarakat termasuk masalah stunting, merupakan perwujudan dari program nawacita yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Konsep membangun dari pinggiran sebagaimana yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014, memiliki serangkaian agenda yang dikenal dengan nama “Nawa Cita” (sembilan Agenda). Oleh karena itu, agenda membangun dari pinggiran muncul pada nawacita ketiga, yang intinya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak pihak menaruh harapan besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini terkesan termarginalkan. Sikap pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah digelontorkan ke desa, sehingga isu desa telah masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai obyek pembangunan, melainkan ditempatkan menjadi subyek dan ujung tombak pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur sendiri pembangunan yang dilakukan di wilayahnya. Tujuan utamanya, tidak lain adalah memudahkan desa mewujudkan kesejahteraan bagi warganya.

Pelibatan pemerintah desa dalam penanganan masalah stunting akan terus didorong guna mewujudkan cita-cita Indonesia unggul tahun 2045. Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah menganalisis strategi kebijakan penurunan angka stunting di tingkat desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa, termasuk memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal yang relevan untuk dikembangkan. Urgensi dari kajian ini sejalan dengan pandangan Priyono (2020) tentang pentingnya menyusun dan menganalisis strategi untuk percepatan penurunan stunting perdesaan, guna menetapkan program-program dan intervensi kegiatan yang tepat. Pemerintah Desa dapat menjadi ujung tombak dalam penanganan kasus stunting, karena selain dekat dan mengetahui kondisi secara langsung keadaan warganya, desa juga memiliki kekuasaan dan pemerintahan yang di dalamnya mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Sebagai salah satu entitas yang diberi amanah oleh pemerintah pusat dalam penanganan masalah stunting, pemerintah desa diharapkan melakukan berbagai strategi sebagai tindak lanjut dari amanah tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat serta sinergi lintas sektor. Desa memiliki banyak potensi terutama

dari modal sosial dan budaya. Bila potensi tersebut dimanfaatkan secara maksimal, tentu akan sangat mendukung program penanganan stunting. Pemanfaatan potensi ini paling tidak menjadi solusi ditengah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah desa.

Secara normatif, pemberian kewenangan kepada pemerintah desa untuk menangani masalah kesehatan di desa, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 26 Ayat (2) dijelaskan bahwa: “Kepala Desa berwenang menyelenggarakan pemerintahan desa, termasuk pelayanan dasar yang mencakup kesehatan. Selain itu, dalam Pasal 68 juga ditegaskan perihal “Hak dan kewajiban masyarakat desa, yang salah satunya terkait akses pelayanan kesehatan”. Dengan demikian, maka regulasi tersebut telah memberikan dasar yang jelas bagi pemerintah desa untuk mengelola kewenangan berbasis lokal dalam menangani masalah kesehatan, termasuk stunting.

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019), pasal 94-95 dijelaskan bahwa “Desa diberikan kewenangan lokal skala desa untuk menangani masalah yang spesifik, seperti stunting, melalui musyawarah desa”. Sedangkan peraturan lainnya adalah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut diatur secara jelas bahwa Dana Desa (DD) dapat digunakan untuk mendukung program pencegahan dan penanganan stunting, seperti penyediaan makanan tambahan, penguatan posyandu, atau edukasi gizi masyarakat.

Penelitian ini dimotivasi oleh fenomena kasus stunting yang terjadi di kabupaten Kolaka utara. Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara, pada tahun 2021 tercatat 559 kasus stunting atau sebesar 8,78 % dari total 6.370 balita yang diukur, angka ini turun menjadi 458 kasus pada tahun 2022 atau sebesar 5,56 dari jumlah balita yang diukur, dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 271 kasus atau sebesar 3,25 dari jumlah balita yang diukur. Dari data tersebut, walaupun menunjukkan adanya penurunan yang signifikan, namun masih memerlukan perhatian serta langkah-langkah preventif lebih lanjut guna menekan angka kasus stunting pada balita di masa mendatang.

Sedangkan khusus di Desa Tinukari yang menjadi lokus penelitian ini, sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak terdapat balita yang mengalami stunting. Beberapa balita yang ditemukan dan dianggap berpotensi stunting, namun telah memperoleh penanganan dari kepala desa yang bekerjasama dengan petugas kesehatan baik yang ada di desa maupun dari puskesmas kecamatan wawo, melalui kegiatan posyandu.

Kesigapan pemerintah desa tinukari dalam mengatasi potensi kasus stunting di desanya, berkat kerjasama yang baik diantara elemen masyarakat yang ada di desa. Hal ini sejalan dengan ciri khas masyarakat pedesaan, yang hingga kini masih memegang kuat budaya gotong royong. Sebuah aktivitas

sosial yang jadi ciri khas bangsa Indonesia dari jaman dahulu. Sebagaimana yang tertuang dalam sila ketiga pancasila yang menekankan adanya “Persatuan Indonesia”. Semangat gotong royong yang dirumuskan dalam sila ketiga tersebut, merupakan kepribadian asli bangsa Indonesia yang sudah berakar kuat dalam kehidupan penduduk. Dalam gotong royong, orang menyelesaikan sebuah aktivitas dengan cara bersama-sama saling sharing setiap pekerjaan. Sekalipun gotong royong memiliki istilah secara beragam di setiap daerah, namun memiliki substansi tujuan yang sama, yakni adanya rasa solidaritas sosial yang muncul dalam masyarakat untuk menyelesaikan berbagai aktivitas kehidupan.

Bagi masyarakat Kolaka Utara, dikenal budaya *kolosara*, dengan salah satu kandungannya adalah budaya gotong royong yang diberi nama “Mepokoaso”. Budaya ini masih dipegang kuat oleh masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupannya. Budaya *Kolosara* adalah sebuah budaya yang berkembang dan dipegang kuat oleh komunitas suku Tolaki, salah satu suku asli yang mendiami Provinsi Sulawesi Tenggara. Kearifan lokal *kolosara* pada tingkat norma-norma merupakan nilai budaya yang berfungsi sebagai pedoman bagi tingkah laku masyarakat Tolaki dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarga, sosial, politik, dan keagamaan. Pada tingkat sistem hukum *kalosara* berfungsi mengatur berbagai kehidupan masyarakat Tolaki (Tarimana, 1993)

Sementara itu, penelitian mengenai kebijakan penanganan masalah stunting berbasis budaya dan kearifan lokal telah banyak dilakukan, misalnya di Gorontalo dimana program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) modifikasi berbasis kearifan lokal terhadap Balita stunting dan gizi buruk mampu mengurangi angka stunting (Irwan, 2019). Begitu juga dengan penelitian di Kabupaten Bireuen di Aceh, pemerintah setempat melakukan formalisasi tradisi *Me Bu Geteng* yang disandingkan dalam program pemberian makanan tambahan untuk memenuhi gizi dan nutrisi pada ibu hamil dan bayi (Yunanda et al., 2022). Penelitian Lamawuran, dkk (2023) menemukan bukti bahwa tradisi *Bu’a Oring* dapat menjadi alternatif dalam penanganan stunting berkelanjutan di kabupaten Flores Timur. Nilai gotong royong, kebersamaan, komitmen dan musyawarah dapat diinternalisasikan untuk mendukung keberlanjutan penanganan stunting secara mandiri oleh masyarakat meski tanpa adanya intervensi pemerintah. Hasil penelitian yang dilakukan Safitra dkk (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan masalah stunting di pedesaan, karena maksimalisasi penggunaan dana desa dalam berbagai upaya-upaya yang untuk menekan angka stunting itu sendiri. Namun dari hasil observasi lebih lanjut ternyata ditemukan fakta bahwa maksimalisasi nilai-nilai kearifan lokal juga cukup efektif untuk menangani masalah stunting.

Berdasarkan beberapa penelitian tentang penanganan masalah stunting berbasis kearifan lokal sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini diarahkan pada strategi pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan memanfaatkan berbagai modal sebagai potensi yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa, baik modal sumber daya alam maupun

modal sosial dan budaya/nilai kearifan lokal. Adapun kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan masukan bagi pihak terkait dalam upaya percepatan penurunan stunting khususnya bagi pemerintah desa, sehingga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Izzuddin dan Agus (2024) bahwa strategi untuk percepatan penurunan stunting di pedesaan disusun untuk menetapkan program-program dan intervensi kegiatan yang tepat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Pendekatan kualitatif menurut Bogdan Dan Taylor (1992), diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi dalam setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

Lokasi penelitian adalah di Desa Tinukari Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan dan wawancara terhadap subjek yang terpilih. Adapun subjek dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang, antara lain: Kepala Desa 1 orang, Petugas Penyuluh Kesehatan Desa 1 orang, dan keluarga yang beresiko stunting 3 orang. Penentuan subjek didasarkan pada pertimbangan penguasaan informasi yang relevan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

Uji validitas data menggunakan triangulasi dengan cara melakukan pengecekan data terkait permasalahan stunting di Desa Tinukari Kecamatan Wawo dari sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber tersebut, dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren (Creswell, 2019). Prosedur triangulasi data dilakukan antara lain: *Pertama*, triangulasi sumber data. Prosedur ini dilakukan dengan menggali data dari berbagai sumber, seperti dari dokumentasi berupa laporan program yang ada di desa. Selain itu juga dilakukan wawancara tambahan dengan para akademisi yang keahliannya relevan dengan tema yang dikaji untuk mendapatkan perspektif lain. *Kedua*, triangulasi peneliti. Dalam model triangulasi ini, peneliti meminta pikiran banding dari kolega untuk membandingkan hasil interpretasi yang telah dilakukan peneliti. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan bias individu.

Adapun analisis data dilakukan berdasarkan prosedur yang disusun oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Sedangkan penyajian data dilakukan dengan melakukan kategorisasi data berdasarkan tema-tema dalam sebuah tabel. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan.

Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi berdasarkan tema yang telah ditemukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Urgensi Kebijakan Penurunan Stunting

Stunting menjadi salah satu topik permasalahan di bidang kesehatan yang terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Hal ini karena dampak negatif yang ditimbulkan, yang tidak hanya pada individu, tetapi juga pada Negara secara umum. Oleh karena itu, pemerintah terus menaruh perhatian pada masalah ini dengan melakukan sinergi dengan berbagai pihak. Baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pada tingkatan pemerintah desa. Namun demikian, penanganan stunting sejatinya tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga diperlukan dukungan masyarakat untuk saling bahu-membahu dan bekerja sama demi percepatan penurunan prevalensi stunting secara cepat dan tepat.

Upaya penurunan stunting sejatinya harus dilakukan sedini mungkin. Hal ini untuk menghindari dampak jangka panjang yang dapat merugikan anak. Kerugian tersebut bisa saja pada faktor terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Menurut Priyono (2020) pencegahan stunting penting untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini sekaligus menjadi penegasan bahwa mengurangi angka stunting adalah sebuah kebijakan yang memiliki nilai investasi strategis bagi masa depan generasi bangsa. Dengan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak sejak dini, pemerintah dapat menciptakan generasi yang lebih kompetitif dalam upaya mencapai generasi unggul. Penurunan stunting di pedesaan akan berkontribusi nyata pada pembangunan sumber daya manusia yang lebih baik. Hal ini karena desa merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia, yang memiliki corak pada pola kehidupan yang beraneka ragam.

Berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia unggul dimasa mendatang, Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan prediksi tentang bonus demografi yang akan dialami oleh Bangsa Indonesia, dan diperkirakan puncaknya akan terjadi sekitar tahun 2030 hingga tahun 2040. Dalam kurun waktu tersebut, pertumbuhan angkatan kerja yang produktif (usia 15-64 tahun) akan tumbuh sekitar 64 % dibandingkan usia non produktif. Namun demikian, pemanfaatan momentum ini dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa saja akan menghadapi kendala, yaitu munculnya kasus “stunting” atau balita kerdil. Sehingga apabila pemerintah keliru dalam mengambil kebijakan dalam penanganannya, maka berpotensi melahirkan masalah baru yang membuat usia produktif penduduk yang berlimpah justru menjadi “bencana demografi”.

Berdasarkan hasil kajian Putri (2023) menunjukkan bahwa permasalahan stunting bukan hanya menimbulkan dampak pada masalah kesehatan, tetapi

juga pada aspek sosial dan ekonomi. Anak-anak stunting akan mengalami gangguan fisik dan perkembangan mental, kekebalan tubuh rendah, gangguan nutrisi dan kesehatan, prestasi akademik rendah. Dengan demikian, akan berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya produktivitas dan ekonomi dalam jangka panjang.

Bagi Pemerintah Desa Tinukari, pentingnya penanganan stunting di pedesaan didorong oleh dua faktor. *Pertama*, sesuai dengan amanah pemerintah yang ditegaskan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dalam pasal 11 pada Perpres tersebut ditegaskan bahwa: (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa; (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. *Kedua*, permasalahan stunting merupakan masalah global dan sewaktu-waktu muncul pada siapa saja, bukan bersifat musiman, sehingga harus dilakukan langkah-langkah konkrit yang bersifat antisipatif. Oleh karena itu, setiap tahun, telah dianggarkan melalui dana desa beberapa kegiatan yang mendukung upaya pencegahan stunting sedini mungkin.

b. Gerakan *Back to Nature*: Sebagai Salah Satu Strategi Pemerintah Desa Dalam Menangani Masalah Stunting

Era globalisasi telah menciptakan ketergantungan yang tinggi pada produk makanan impor. Kondisi demikian, mendorong masyarakat sering melupakan kekayaan pangan yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk membiasakan masyarakat mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi adalah memperkenalkan sumber pangan lokal untuk peningkatan kadar gizi. Memaksimalkan penggunaan pangan lokal tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga memiliki banyak manfaat lain yang berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pangan lokal mencakup berbagai jenis produk yang diproduksi di dalam negeri, dari sayur-sayuran hingga pangan lainnya. Oleh karena itu, Pangan lokal sering kali lebih segar dan lebih bergizi karena tidak memerlukan waktu lama untuk sampai di tangan konsumen. Sayur dan buah yang dipanen di dekat lingkungan cenderung memiliki kandungan vitamin dan mineral yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang disimpan dan diangkut dari jarak yang cukup jauh. Dengan kandungan gizi yang cukup tentu akan memberikan dampak yang baik pada upaya memperbaiki kualitas gizi anak, serta penurunan kasus-kasus stunting yang terjadi di daerah (Azriful et al., 2022).

Sebagai negara yang memiliki potensi pertanian yang besar, tentu memiliki ketersediaan bahan makanan lokal yang sangat beragam. Bahan yang disarankan dalam Pedoman Umum Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Lokal Tahun 2006 oleh Depkes RI, yaitu sumber karbohidrat (ubi,

beras, singkong, jagung, kentang, tepung beras/sagu/terigu/jagung), protein hewani (daging, hati ayam, ayam, susu, udang, ikan lele/kembung/mujair), protein nabati (kedelai, tahu, tempe, kacang hijau/tanah/tolo), sayur (wortel, bayam, sawi, labu kuning, selada air, tomat, seledri, jagung muda, kangkung) dan buah (pisang kepok/ambon). Cita rasa juga dapat ditingkatkan dengan penambahan rempah lokal, antara lain jahe, pala, cengkeh, ketumbar, bawang merah/putih/prei, daun bawang, salam, lengkuas, sereh, dan lain-lain.

Kabupaten Kolaka Utara, khususnya Desa Tinukari memiliki potensi kekayaan alam yang sangat baik untuk menunjang perbaikan gizi anak. Melalui gerakan edukasi *back to nature* (kembali ke alam) juga memberikan perhatian pada pendayagunaan bahan pangan lokal yang potensial, termasuk bahan pangan yang selama ini sudah sering dikonsumsi maupun yang masih belum tersentuh karena manfaat yang masih belum terjamah. Pemantapan ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional karena akses terhadap pangan dengan gizi yang cukup merupakan hak asasi manusia, kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan penentu bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau masyarakat dan diutamakan berasal dari pangan lokal (Azriful et al., 2022).

Poin penting dari gerakan edukasi ini adalah bahwa dengan memaksimalkan pemanfaatan produk pangan lokal merupakan salah satu intervensi komunitas pada penanggulangan stunting. Hal sesuai dengan saran dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), bahwa mengonsumsi pangan lokal sesuai dengan pola masyarakat setempat dapat menghemat biaya, dan mudah ketersediaannya. Selain itu, kesesuaian dengan budaya dan potensi daerah dapat memberikan pengaruh dalam jangka panjang dibandingkan menggunakan rekomendasi secara umum.

Hasil riset yang dilakukan oleh Susanto., et al (2017) menunjukkan pemberian pangan lokal dengan melibatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dapat meningkatkan status gizi anak usia 6-36 bulan. Oleh karena itu disarankan perlunya mendorong Posyandu di pedesaan untuk memfasilitasi program makanan pendamping berbasis pangan lokal bagi komunitas. Adanya kegiatan posyandu di Indonesia dapat dijadikan gerbang utama untuk menanggulangi stunting karena prinsipnya adalah posyandu dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Bagi masyarakat Desa Tinukari, keterbatasan ekonomi harus disikapi dengan cara memanfaatkan pangan lokal yang tidak saja murah dari sisi harga, namun juga mudah diperoleh. Ketersediaan lahan dengan tanah yang subur akan dimanfaatkan dengan menanam sayuran segar di sekitar lahan perkebunan mereka. Dengan demikian, maka memaksimalkan potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu daerah. Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang berbeda

menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal suatu daerah yang ada (Aditiawati et al., 2016).

c. Membangun Kolaborasi Berbasis Nilai Kearifan Lokal.

Pendekatan budaya sebagai sebuah strategi dalam penanganan masalah stunting di lingkungan masyarakat desa tinukari, dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat, khususnya dalam membantu merancang berbagai program intervensi. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa stunting merupakan masalah kompleks yang melibatkan banyak aspek, termasuk budaya. Oleh karena itu, pendekatan berbasis budaya dapat menjadi salah satu solusi yang baik. Kebijakan penanganan kesehatan yang dirancang tanpa mempertimbangkan nilai-nilai budaya seringkali tidak efektif. Program-program penyuluhan gizi misalnya, yang hanya difokuskan pada pendekatan ilmiah tanpa menyelaraskan dengan cara pandang masyarakat tentang makanan dan kesehatan, cenderung kurang mendapatkan respons positif. Oleh karena itu, menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal akan lebih efektif untuk membangun kepercayaan, meningkatkan penerimaan, dan memastikan keberlanjutan intervensi kasus-kasus kesehatan yang ada di masyarakat. Sinergi antara pemahaman budaya dengan ilmu kesehatan dapat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dalam penanganan masalah kesehatan tersebut.

Pemanfaatan potensi lokal sebagai kekayaan alam, termasuk budaya dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah merupakan kreativitas dari setiap pemerintah. Potensi alam pada sebuah daerah bergantung dari kondisi geografis, iklim, serta bentang alam daerah tersebut. Keadaan alam yang berbeda menghasilkan keragaman serta menjadikan ciri khas potensi lokal setiap wilayah. Sehingga pembangunan masyarakat bisa dimulai dengan melihat kekhasan bentang alam, perilaku dan budaya masyarakat setempat, sehingga akan memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi lokal suatu daerah yang ada (Aditiawati et al., 2016).

Pejabat Bupati Kolaka Utara pada saat memberikan arahan dalam forum rembuk stunting tahun 2023 di Kabupaten Kolaka Utara, menyampaikan perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan elemen masyarakat lainnya dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kolaka Utara. Upaya penurunan stunting tidak hanya melibatkan pemerintah saja, tetapi juga perlu dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan arahan tersebut, maka pemerintah Desa Tinukari mengambil langkah-langkah strategis dengan memanfaatkan potensi yang tersedia dalam melakukan penanganan terhadap kasus stunting. Walaupun disadari bahwa dengan keterbatasan anggaran dana desa yang tersedia untuk program tersebut, tetapi tidak berarti harus pasif dalam bertindak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama unsur

masyarakat adalah meningkatkan sprit “mepokoaso” dalam menangani berbagai permasalahan di masyarakat..

“...ketika saya pertama kali dilantik menjadi kepala desa, program pertama kami khususnya dalam bidang kebudayaan adalah menghidupkan kembali kesenian tradisional. Kesenian tradisional ini memang telah lama dilupakan masyarakat karena memang tidak menjadi perhatian utama pemerintah sebelumnya. Walaupun menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya yang mempertanyakan urgensi dari program ini untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi dikaitkan dengan era digitalisasi saat ini. Tapi kami berusaha meyakinkan bahwa secara jangka pendek memang tidak akan terlihat dampaknya, tapi dalam jangka panjang hal ini akan memiliki dampak positif dan signifikan dalam membangun kebersamaan. Karena dengan menghidupkan kesenian tradisional ini akan membangkitkan kembali spirit mepokoaso (bersatu/bersinergi) d dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat di desa”

Spirit nilai mepokoaso yang coba dihidupkan oleh pemerintah Desa Tinukari, diwujudkan melalui gerakan bersinergi pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat. Secara konkrit salah satu gerakan yang dibangun adalah membiasakan berbagi. Program “berbagi itu indah” dilakukan pada setiap kesempatan sesuai dengan aktivitas masyarakat. Para petani yang telah memanen sayur-sayuran biasanya menyisihkan sebagian hasil panennya untuk dibagi secara cuma-cuma kepada masyarakat yang dianggap membutuhkan. Sedangkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan juga melakukan hal yang sama. Dengan gerakan ini paling tidak telah memberi manfaat pada pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa menuturkan bahwa:

“...mengatasi stunting ini, kami sebagai pemerintah desa tentu tidak bisa bekerja sendiri, tapi keterlibatan semua unsur dalam masyarakat untuk saling bersinergi amat penting dihadirkan sebagai upaya percepatan penurunan stunting itu sendiri...”

Dalam gerakan sinergi sebagaimana spirit “mepokoaso” menunjukkan keterlibatan setiap unsur dalam masyarakat untuk berkontribusi pada penanganan masalah stunting sesuai dengan peran dalam masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam merancang program intervensi dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Para tokoh agama misalnya dilibatkan agar dalam setiap ceramah agama menyisipkan pesan-pesan agama yang berkaitan dengan pentingnya memelihara kesehatan. Bahkan para mahasiswa yang telah melakukan aktivitas Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tinukari juga diminta dalam penyusunan program kegiatan selama di desa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi ibu dan balita.

Dengan demikian, pelibatan masyarakat dalam merancang program intervensi, paling minimal dapat menciptakan solusi yang lebih relevan dan efektif. Karena bagaimanapun permasalahan stunting bukan sekedar masalah

kesehatan, tetapi juga masalah budaya, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, semua pihak harus bekerja sama, menghargai setiap perbedaan budaya, dan saling belajar demi masa depan yang lebih baik untuk masa depan anak-anak kita.

Nilai “mepokoaso” sebagai kearifan lokal bagi masyarakat Kolaka Utara mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial yang kuat. Hal ini dapat menjadi spirit dalam menjalin sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan organisasi sosial ataupun elemen masyarakat lainnya. Dengan kolaborasi yang terjadi tersebut, pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas program-program penanganan stunting melalui pemberdayaan masyarakat khususnya yang ada di pedesaan.

IV. KESIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara telah memberikan komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan stunting yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Peningkatan alokasi anggaran untuk program-program gizi dan kesehatan terus menjadi prioritas. Dari upaya tersebut telah memberikan dampak yang baik dan nyata dalam penanganan masalah stunting. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara umum dalam rentang waktu tiga tahun terakhir yakni dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Jika pada 2021 tercatat 559 kasus stunting, angka ini turun menjadi 458 pada tahun 2022, dan terus menyusut menjadi 271 kasus pada tahun 2023. Upaya pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, dengan memberikan instruksi kepada setiap pemerintah desa agar mengambil langkah-langkah kreatif dan strategis terkait permasalahan stunting di desa masing-masing, telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa tinukari dengan menetapkan strategi berbasis potensi desa. Strategi tersebut didasarkan pada masukan yang berkembang pada acara rembuk stunting tingkat Desa. Adapun strategi yang dilakukan antara lain adalah: *Pertama*, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang gerakan *back to nature* (kembali ke alam). Gerakan ini dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan tidur selama ini dengan menanam sayur-sayuran segar untuk konsumsi rumah tangga. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa dengan memanfaatkan lahan pekarangan merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sehat bagi setiap rumah tangga. *Kedua*, menghidupkan kembali spirit nilai kearifan lokal yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat desa tinukari. Spirit “Mepokoaso” (bersatu/bergotong royong) adalah sebuah budaya yang tumbuh dalam masyarakat tolaki tentang perlunya bergotong royong atau bahu membahu dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh anggota masyarakat. Melalui budaya ini, maka seluruh elemen masyarakat diminta untuk memaksimal fungsi-fungsi edukasi sesuai peran masing-masing. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka disarankan kepada Pemerintah Desa agar terus merawat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat dan pihak terkait, sehingga permasalahan stunting

yang berpotensi timbul dapat diatasi secara bersama dengan cara yang baik. Dan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat isu tentang stunting, disarankan agar memperluas jangkauan kajian dengan memasukkan dimensi-dimensi lain yang dianggap memiliki potensi untuk menjadi solusi yang tepat dalam pencegahan masalah stunting.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditiawati, P., Indriani, A. D., Suantika, G., & Simatupang, T. M. (2016). Pengembangan Potensi Lokal Di Desa Panawangan Sebagai Model Desa Vokasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Sosioteknologi*, 15(1), 59–67. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2016.15.1.6>
- Azriful, A., Ghaffar, N. A., Jusriani, R., Mallapiang, F., & Nildawati, N. (2022). Pendampingan Kelompok Tani dalam Pengembangan Pangan Lokal Kaya Protein Bintotoeng (Cajanus Cajan) Potensial Pencegahan Stunting di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *KHIDMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 30–42.
- Bogdan dan Taylor, (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Creswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143
- Har T, Riant N (2016). *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). Published online 2016:241
- Irwan, I. (2019). Pemberian PMT Modifikasi Berbasis Kearifan Lokal Pada Balita Stunting dan Gizi Kurang. *Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 139–150. <https://doi.org/10.37905/sibermas.v8i2.7833>
- Izzuddin, Riyan P dan Agus Widiyarta (2024). Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Volume 5. No. 2. (2024), hlm 971-986
- Lamawuran, Yosef Dionisius, dkk (2023). Tradisi Bu'a Oring: Alternatif Penanganan Stunting Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Agregasi : Jurnal Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* Volume 11– Nomor 2, November 2023, (Hlm 112-128) DOI 10.34010/agregasi.v11i2.11228
- Lestari, Tri Rini Puji (2023). Stunting Di Indonesia: Akar Masalah Dan Solusinya, *Info Singkat*. Vol. XV, No. 14/II/Pusaka/Juli/2023. Hal. 21-25
- Nisa, Latif S. (2018). Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Volume 13 Nomor 2 Desember 2018 : 173 – 179.
- Phitra, Fajar Aria, dkk (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting di Desa Lokus Stunting Kabupaten Merangin Tahun

2022. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI). VOLUME 12 No. 03 September 2023 Hal. 127 - 141
- Priyono, (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Bayumundu, Kabupaten Pandeglang). Jurnal Good Governance Volume 16 No. 2, September 2020 hal. 149-174
- Putri, Risya Ananda, dkk (2023). Pemanfaatan Potensi Lokal dalam Upaya Pencegahan Stunting. Internasional Journal Of Demos. Volume 5, Issue 1, March 2023
- Rahman, Zainul dkk (2021). Analisis Kebijakan Pencegahan Stunting Dan Relevansi Penerapan Di Masyarakat (Studi Kasus: Desa Donowarih). Jurnal Karta Raharja 2(1) (2021); Hal 27-3
- Safitra, L., Yuliani, F., & Abdul Tofandi. (2021). Stunting Prevention Program In North Bengkulu Regency. Ilmu Sosial Mamangan, 10(2), 116–125
- Susanto T., (2017). Local-food-based complementary feeding for the nutritional status of children ages 6-36 months in rural areas of Indonesia. Korean J Pediatr. 2017 Oct;60(10):320-326. doi: 10.3345/kjp.2017.60.10.320. Epub 2017 Oct 20. PMID: 29158766; PMCID: PMC5687979.
- Tarimana, Abdurrauf, (1985), Kalo Sebagai Kebudayaan Tolaki, Disertasi tidak diterbitkan, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Yunanda, R., Chalid, I., & Meliza, R. (2022). Formalisasi Tradisi “Me Bu Gateng” sebagai Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Bireuen. Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi), 16(1), 56–64. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.25585>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 Tentang Percepatan Penurunan Stunting